

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa secara umum merupakan pembagian antar wilayah administratif kecamatan yang dipimpin oleh kades atau kepala desa. Menurut Kadjudju dan Morasa (2017) desa merupakan kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, serta kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga diperlukannya ketegasan ekstensi desa agar dapat mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Undang-undang No. 6 Tahun 2014). Kemandirian merupakan salah satu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Undang-undang No. 6 Tahun 2014). Salah satu upaya untuk mencapai kemandirian tersebut desa dapat menjangkau kelompok sasaran yang akan disejahterakan, yaitu dengan

membentuk Badan Usaha Milik Desa atau disebut dengan BUMDes (Permendagri No. 39 Tahun 2010).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga ekonomi dengan modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat desa dan menganut asas mandiri. BUMDes merupakan badan usaha yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa, dan juga dapat menjadi peluang usaha atau meningkatkan lapangan pekerjaan serta menambah wawasan masyarakat desa, dan juga sebagai wadah untuk aktivitas perekonomian masyarakat desa. BUMDes dikatakan sebagai payung bagi semua kegiatan ekonomi di desa, yang artinya BUMDes dapat mewadahi segala aktivitas atau usaha perekonomian desa, serta mendorong masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di desa. BUMDes diharapkan dapat mewadahi segala usaha ekonomi dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dalam pembangunan desa, dan potensi perekonomian di desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya (Rudini, Nurhayati, & Afriyanto, 2014)

Perkembangan BUMDes di Indonesia yang sangat pesat, sehingga membutuhkan pencatatan akuntansi yang ikut serta berperan sebagai alat untuk mengkomunikasikan informasi mengenai transaksi keuangan. Upaya global dalam menyelaraskan standar akuntansi telah berjalan dengan cepat, dengan asumsi bahwa sistem pelaporan keuangan didukung oleh pemerintahan yang memiliki standar kualitas dan kerangka peraturan-peraturan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi (Joshi dan Yapa, 2014). Akuntansi dan pelaporan menerapkan sistem efektif yang mencerminkan bagaimana kondisi dan dimana

sebuah entitas beroperasi. Laporan keuangan harus dapat diinterpretasikan oleh para pihak yang memiliki kepentingan dengan persepsi yang sama, untuk itulah perlu adanya suatu standar akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan suatu entitas. Salah satu indikator terlaksananya penerapan prinsip akuntansi yang tepat pada BUMDes adalah melalui penyelenggaraan akuntansi secara benar dan tepat. Adanya standar akuntansi dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan karena juga meningkatkan entitas tetap transparan (Putri Amalia, 2019).

(Amalia, 2019)

Laporan keuangan menggambarkan pengaruh keuangan yang terjadi dimasa lalu dan tidak memiliki suatu kewajiban untuk memberikan informasi non keuangan. Penggunaan laporan keuangan sendiri digunakan sebagai bahan untuk mencari informasi mengenai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi yang telah dilakukan oleh entitas. Laporan keuangan di Indonesia pada dasarnya memiliki suatu pedoman tersendiri yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Salah satu standar penyusunan laporan keuangan tersebut berupa Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang di kemudian dibagi menjadi Standar Akuntansi Keuangan yang berbasis IFRS (SAK Umum) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (Afriyanto, 2012)

Standar Akuntansi Keuangan yang berbasis IFRS (SAK Umum) ini ditujukan untuk entitas yang memiliki pertanggungjawaban publik signifikan, sedangkan untuk entitas yang tidak memiliki pertanggungjawaban publik dapat menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas

yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan tetapi tetap menerbitkan laporan keuangan yang ditujukan untuk umum (Raja, 2012). Standar ini dapat mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Salah satu indikator yang dilaksanakan sebagai penerapan prinsip akuntansi yang tepat pada BUMDes adalah melalui penyelenggaraan akuntansi secara tepat dan benar. Ikatan Akuntan Indonesia, menyatakan laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi, neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi (Oktaviani, 2019).

Salah satu daerah yang sudah menjalankan program BUMDes dari sepuluh desa di kecamatan Sudimoro adalah BUMDes Arum yang berada di daerah Sukorejo Kabupaten Pacitan. BUMDes Arum sudah memiliki badan hukum pendirian dibandingkan dengan BUMDes lain di kecamatan Sudimoro. BUMDes ini memiliki beberapa produk yang ada didalamnya seperti pertokoan, persewaan molen, persewaan kios rest area cagak telu, dan simpan pinjam. BUMDes memiliki modal awal 10% dari APBDes, sehingga BUMDes Arum harus mempertanggung jawabkan semua jenis usahanya dengan membuat laporan pertanggung jawaban BUMDes. BUMDes Arum apabila dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki SDM yang masih tergolong kurang, karena SDM yang ditugaskan untuk mengelola Laporan Keuangan tersebut masih kurang kompeten dalam bidang keuangan, dimana seharusnya laporan keuangan yang digunakan dalam BUMDes Arum tersebut sudah menggunakan SAK-ETAP yang pada dasarnya digunakan sebagai standar untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas kepada publik (Yulianti & Dyah Nirmala, 2019).

BUMDes Arum merupakan salah satu BUMDes yang ada di Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan. Laporan keuangan yang disusun oleh BUMDes Arum tergolong sederhana. Penggunaan SAK ETAP sangat diperlukan untuk menyusun laporan keuangan BUMDes karena kelengkapan laporannya bisa memberikan informasi yang akurat.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rudini dkk (2011) yang hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan (jurnal) atas berbagai transaksi yang dilakukan. Penggolongan transaksi pada BUMDes Langkitin belum sesuai dengan SAK ETAP. BUMDes Langkitin menggunakan jurnal memorial untuk peringkasan dan neraca percobaan untuk pengikhtisaran sehingga belum sesuai dengan SAK ETAP. BUMDes Langkitin menyajikan laporan keuangan hanya dalam dua jenis yaitu neraca dan laporan laba rugi sedangkan menurut SAK ETAP ada lima jenis yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jayanti dkk (2018) yang hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan atas berbagai transaksi yang dilakukan penggolongan transaksi pada BUMDesa Surya Sejahtera belum sesuai dengan SAK ETAP. BUMDesa Surya Sejahtera menyajikan laporan keuangan hanya tiga jenis yaitu neraca, laporan laba rugi, dan kas sedangkan menurut SAK ETAP ada lima jenis yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penelitian lainnya dilakukan Rizqi (2019) pada penelitiannya yang hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian penyajian laporan

keuangan BUM Desa Prima berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK ETAP). Sumber Daya Manusia yang kurang memadai dan tidak adanya penyuluhan pembuatan laporan keuangan menjadi faktor ketidaksesuaian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dan kurangnya kesadaran pemerintah desa terhadap pentingnya laporan keuangan.

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penyusunan laporan keuangan BUMDes Arum berdasarkan variabel pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi. Variable ini akan dibandingkan menggunakan standar SAK ETAP dan Permendagri No 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa pada penyusunan laporan keuangan BUMDes Arum. Analisis data pada proses perbandingan ini nantinya akan menghasikan standar yang cocok digunakan untuk menyusun laporan keuangan BUMDes Arum. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada metode analisis data. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Jayanti dkk (2018) menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menguraikan hasil wawancara yang dilakukan dilapangan. Sedangkan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dimna analisis penerapan SAK ETAP dalam penelitian ini dilihat dari pengakuan, pengukuran dan pelaporan penyusuna dalam laporan keuangan BUMDes Arum Desa Sukorejo Kabupaten Pacitan.

Penyusunan laporan keuangan menjadi salah satu hal mutlak yang harus dimiliki oleh BUMDes. BUMDes harus menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai pedoman SAK ETAP (2013) pada bab 3 tentang penyajian laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penelitian ini akan membahas

bagaimana penerapan penyusunan laporan keuangan BUMDes Arum sesuai SAK ETAP. Berdasarkan latar belakang yang dibahas diatas maka peneliti menarik judul penelitian yaitu **“Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan SAK ETAP Pada BUMDes Arum Desa Sukorejo”**.



1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari uraian di atas maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis atas penyusunan laporan keuangan BUMDes Arum berdasarkan SAK ETAP ?
2. Bagaimana kesesuaian pengakuan, pengukuran dan penyajian laporan keuangan BUMDes Arum berdasarkan metode pada SAK ETAP ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui mekanisme penyusunan laporan keuangan pada BUMDes Arum berdasarkan SAK ETAP.
- 2) Untuk mengetahui tingkat kesesuaian penyusunan laporan keuangan BUMDes Arum berdasarkan standar SAK ETAP.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi dan ilmu pengetahuan terkait dengan penyusunan laporan keuangan BUMDes berdasarkan metode pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi pada SAK ETAP.

- 2) Bagi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Arum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada BUMDes dalam rangka penyusunan laporan keuangan BUMDes berdasarkan metode pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi pada SAK ETAP.

3) Bagi Para Akademisi

Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini sebagai bahan referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam tema penyusunan laporan keuangan BUMDes berdasarkan metode pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi pada SAK ETAP. (Jayd., & Qomari, 2018) (Priadianto, Sinar Purnamawatu, 2017)